

LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Batang

Nomor Registrasi: 33.25-13951-42505-2021



1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

SIKOHAR

1.2. Dibuat Oleh

Sekretariat Daerah Kabupaten Batang (setda.batang)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

OPD

1.5. Jenis Inovasi

Digital

1.6. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi tata kelola pemerintahan daerah

1.7. Urusan Inovasi Daerah

Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.8. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Semua aktivitas yang ada pada sekretaris daerah berpedoman pada sumber hukum dan undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia. Akan tetapi saat ini masih melakukan pencarian sumber hukum dan undang-undang tersebut melalui browser. Hal ini dirasa kurang efektif karena tidak semua sumber hukum tercantum dengan lengkap dan benar. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem informasi untuk membantu para pegawai mendapatkan informasi sumber hukum dan undang-undang yang berlaku agar tugas-tugas dapat dikerjakan dengan

lancar, membantu dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan kinerja para pegawai maupun *stake holder* lainnya.

Di era digital masa kini, dengan berbagai kemudahan dan kecanggihan komputerisasi, internet dapat diberdayakan dalam hal keterbukaan informasi hukum sehingga para pihak terkait maupun yang membutuhkan informasi dapat mengetahui proses penyusunan produk hukum daerah. Akses informasi hukum untuk ASN (khususnya) dan masyarakat pada umumnya masih minim, oleh karena itu diperlukan informasi lebih mengenai hal tersebut agar terintegrasi dengan baik. Untuk Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dikembangkan sebuah sistem informasi Koordinasi dan Harmonisasi yang dapat mempermudah pembuatan produk hukum secara digital. secara cepat, mudah, terpadu dan terintegrasi serta perlu bekerja sama lebih erat dalam suatu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang terpadu dan berkesinambungan yang beranggotakan Instansi Pemerintah yang bergerak dibidang pengembangan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Bahwa dalam rangka proses penyusunan produk hukum daerah mulai dari pengajuan rancangan produk hukum daerah sampai dengan penandatanganan agar tersusun secara sistematis dan efisien sekretaris daerah merancang sebuah inovasi dengan nama SIKOHAR. Dengan adanya sistem informasi Koordinasi dan Harmonisasi diharapkan dapat mempermudah pembuatan produk hukum secara digital. Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata Pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Dalam Ilmu Hukum dikenal Teori Fictie. Teori ini menyimpulkan bahwa setiap orang dianggap tahu hukum yang diberlakukan pada suatu tempat. Maka tidak ada alasan apabila seseorang melanggar hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum berdalih dirinya tidak mengetahui hukum yang dimaksud. Berdasarkan sistem dari SIKOHAR ini dimaksudkan dapat mempermudah pembuatan produk hukum secara digital dimana sekretaris daerah merancang suatu sistem yang mengkoordinir dalam pembuatan produk hukum secara digital agar lebih tersistem dan efisien.

1.9. Tujuan Inovasi Daerah

Mengintegrasikan data proses penyusunan produk hukum daerah mulai dari pengajuan rancangan produk hukum daerah sampai dengan penandatanganan

1.10. Manfaat Yang Diperoleh

Terlaksananya proses penyusunan produk hukum daerah dengan baik mulai tahapan pengajuan/pendaftaran sampai dengan penandatanganan.

1.11. Hasil Inovasi

Website/aplikasi sikohar yang berisi tahapan proses penyusunan produk hukum daerah (Perda, Perbup, Keputusan Bupati)

1.12. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

04-12-2019

1.13. Waktu Implementasi

06-01-2020

1.14. Anggaran

-

1.15. Profil Bisnis -

1.16. Kematangan

12.00

2. INDIKATOR INOVASI

NoIndikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1. Regulasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
2. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Tidak Tersedia
3. Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan uji coba inovasi daerah	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
4. Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara elektronik	aplikasi sistem informasi koordinasi dan harmonisasi
5. Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6. Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	-	Tidak Tersedia
7. Jejaring Inovasi	-	Tidak Tersedia
8. Replikasi	-	Tidak Tersedia

9. Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10. Pelaksana Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
11. Kemudahan Informasi Layanan	-	Tidak Tersedia
12. Penyelesaian Layanan Pengaduan	-	Tidak Tersedia
13. Keterlibatan aktor inovasi	-	Tidak Tersedia
14. Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
15. Online Sistem	-	Tidak Tersedia
16. Kecepatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
17. Kemanfaatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
19. Sosialisasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
20. Kualitas Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia